



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 5 Juli 2017
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.30 WIB s.d 17.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: 1. Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2018 Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). 2. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 sampai bulan Mei 2017 dari Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pada hari ini adalah pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2018 Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 sampai bulan Mei 2017.
3. Ketua Rapat mempersilakan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami pagu indikatif Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan BMKG sesuai dengan SB Pagu Indikatif Tahun 2018 No. S-398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 Tanggal 9 Mei 2017; pagu indikatif sesuai dengan hasil *Trilateral Meeting* Tanggal 17-19 Mei 2017 masing-masing lembaga dengan Kemenkeu dan Bappenas sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF
1.	Kementerian Perhubungan	102.061.300.655	48.486.133.783
2.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	4.501.918.147	2.035.099.560
3.	BMKG	2.697.435.200	1.702.912.900

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan BMKG akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan penyesuaian pagu indikatif TA 2018 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan BMKG untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2018 berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan BMKG untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi, dan program masing-masing Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan BMKG untuk meningkatkan pola komunikasi dan kerjasama kemitraan dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan dan kelancaran pelayanan transportasi nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

MENTERI PERHUBUNGAN,


BUDI KARYA SUMADI

KEPALA BMKG,


ANDIEKA SAKYA

Jakarta, 5 Juli 2017

KETUA RAPAT,


FARY DJEMY FRANCIS

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,


M. SYAUGI